

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA

(Studi Pada Desa Jedong, Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)

Anselmus Buta Delu, Willy Tri Hardiyanto, Asih Widi Lestari
Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi
E-mail : anseldelu@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Kebijakan alokasi dana desa dalam program pembangunan infrastruktur desa Pada Desa Jedong, Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. implementasi kebijakan publik merupakan suatu bentuk proses atau serangkaian proses pelaksanaan kebijakan publik yang ditawarkan oleh pemangku kebijakan dan dijalankan oleh pelaksana kebijakan itu sendiri dengan harapan dapat mencapai tujuan dan dapat mengenai sasaran yang telah ditetapkan. Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Dengan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Penentuan informan menggunakan *purposive sampling*. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan keabsahan data. Hasil dari penelitian disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan alokasi dana desa dalam program pembangunan infrastruktur desa Pada Desa Jedong Sudah Baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan beberapa informan yakni terkait dengan pola Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi didapatkan hasil yang baik karena adanya peran serta Pemerintah Desa dan BPD dalam upaya partisipasi pembangunan Jalan Sudah baik.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Alokasi Dana Desa

**IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND ALLOCATION POLICY IN THE
VILLAGE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROGRAM**

(Study in Jedong Village, Wagir District, Malang Regency)

Anselm Buta Delu, Willy Tri Hardiyanto, Asih Widi Lestari

Public Administration Study Program, FISIP, Tribhuwana Tunggaladewi
University

Email: anseldelu@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses the implementation of village fund allocation policies in the village infrastructure development program in Jedong Village, Wagir District, Malang Regency. Public policy implementation is a form of process or series of public policy implementation processes offered by policy makers and carried out by the policy implementers themselves in the hope of achieving the goals and achieving the targets that have been set. Village Fund Allocation or ADD is the portion of Village finances obtained from Regional Tax Revenue Sharing and the portion of Central and Regional Financial Balance Funds received by the district. According to the Minister of Home Affairs Regulation Number 37 of 2007 concerning Village Financial Management Guidelines in Article 18, the Village Fund Allocation comes from the Regency/City APBD which is sourced from the portion of the Central and Regional Financial Balance Funds received by the Regency/City for the Village of at least 10% (ten percent). The type of research used is descriptive analysis with a qualitative approach method. With data sources, namely primary data and secondary data. Determining informants using purposive sampling. Data collection methods were carried out by observation, interviews and documentation. Data analysis techniques are data reduction, data presentation, and data validity. The results of the research concluded that the implementation of the village fund allocation policy in the village infrastructure development program in Jedong Village was good. This can be proven by the results of interviews with several informants, namely related to communication patterns, resources, disposition/attitude of implementers and bureaucratic structure. Good results were obtained because the participation of the Village Government and BPD in efforts to participate in road construction was good.

Keywords: Policy Implementation, Village Fund Allocation